

Sasaran Program/Kegiatan

1. Perbendaharaan negara yang optimal
2. Dukungan manajemen yang efektif
3. Pelaksanaan anggaran yang optimal
4. Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien
5. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel
6. Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas
7. Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel

Indikator Kinerja dan Target

1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
2b-CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	3
1c-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil DJPb	4
2a-CP	Tingkat Kualitas Implementasi Kemenkeu Kewilayahan	100%
2b-N	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Kanwil DJPb	4
3a-N	Nilai Kinerja Penyaluran Dana Trasfer ke Daerah pada KPPN	90
3b-N	Indeks Kualitas Operational Treasury	4
4a-N	Persentase Akurasi Perencanaan Kas	81%
5a-N	Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS)	4
6a-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	4
6b-N	Indeks Kualitas Pembinaan BLU dan Asistensi Pembinaan BLUD	4
7a-CP	Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory	80%
8a-N	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	100%
8b-N	Nilai Impelementasi Learning Organization	85
8c-N	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	86
9a-CP	Indeks Pengelolaan Keuangan Kanwil DJPb	100
9b-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100

Peta Strategis

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

Gedung Keuangan Negara Lt. 2
Jl. Kapten A. Rivai No. 2-4
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 356534

Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan tugas dimaksud Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
- Penyusunan revidi belanja pemerintah (spending review) dan revidi pelaksanaan anggaran;
- Pembinaan teknis sistem akuntansi;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
- Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
- Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah;
- Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
- Pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah; .
- Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
- Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
- Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
- Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
- Pelaksanaan kepatuhan internal; dan
- Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Visi

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Misi

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Integritas
Profesionalisme
Sinergi
Pelayanan
Kesempurnaan

